



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PURWAKARTA



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta 2024-2026, ditetapkan bahwa visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu **“PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”**, dimana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta mengimplementasikan misi **“MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING DAN BERBASIS POTENSI LOKAL”**. Tahun 2024 adalah tahun ke satu dalam pelaksanaan RENSTRA Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yang memiliki tugas melakukan upaya maksimal dalam tercapainya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.

Untuk mencapai tujuan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta telah menetapkan 3 (tiga) sasaran OPD antara lain:

1. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja;
2. Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta telah mengajukan pada PD terkait kepegawaian yaitu BKPSDM Kabupaten Purwakarta untuk menambah jumlah aparatur di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan aparatur - aparatur pada kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2024.

Dalam tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	SASARAN	IKU
1	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
2	Meningkatnya Produktivitas Kemandirian Transmigran dan Bagi	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih
		Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 Indikator tersebut, 6 memenuhi target memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, tetapi sudah melaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui DBHCHT dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.083.758.479,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.918.698.755,- atau 91,10 %.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja.

Purwakarta, 05 Januari 2025

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN PURWAKARTA



DIDI GARNADI, S.Pd, MM.
NIP. 19720319 199903 1 001

DAFTAR ISI

COVER.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
I.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	15
I.4 Landasan Hukum.....	20
I.5 Sistematika	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	25
II.1 Rencana Strategis	25
II.2 Rencana Kinerja	29
II.3 Perjanjian Kinerja.....	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	46
III.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	46
A. Perbandingan target dan realisasi tahun ini.....	47
B. Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya	49
C. Perbandingan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah	51
D. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nas/prov/kab	52
E. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusinya	55
F. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	58
G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	60
III.2 Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Permasalahan.....	73
C. Langkah Perbaikan yang Akan Datang.....	74
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Sumberdaya Manusia Berdasarkan Jabatan.....	14
Tabel 1.2	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan.....	15
Tabel 2.1	Misi dan Tujuan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten	28
Tabel 2.2	Tujuan Dinas Ketenagakerjaan dan ransmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026	28
Tabel 2.3	Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026	29
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta	41
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	42
Tabel 2.6	Rencana Kinerja Program Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	43
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	45
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja	46
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun ini	48
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	50
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Target Rencana Pembangunan Daerah	52
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	53
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Dan Solusi	56
Tabel 3.7	Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja	59
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Dan Kegiatan	62
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta	64
Tabel 3.10	Rincian Realisaasi Kinerja Program dan Kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ..	67

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan Negara. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam menjalankan tugas- tugas pemerintah daerah wajib menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang mendasari pada perencanaan dan hasil pada ketetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan SKPD diharuskan untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Negara, berkewajiban untuk mempertanggung- jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Hal tersebut dimulai dengan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Dalam rangka menghasilkan data yang berkualitas, tepat waktu, dan akuntabel. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra periode 2024 - 2026. Renstra mengalami pengembangan yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan. Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu

kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta tahun 2024 disampaikan sebagai pertanggungjawaban kegiatan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban periodik, sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Kabupaten untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta dengan harapan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta ;
2. Mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

I.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja, transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta Kepala transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, dinas menyelenggarakan fungsi.

Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Sub Subtansi Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan :
 - Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Subtansi Bina Produktivitas;
 - Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Subtansi Pelatihan dan Pemagangan;
 - Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Subtansi Standarisasi.
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
 - Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Subtansi Kesempatan Kerja;
 - Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Subtansi Penempatan Tenaga Kerja;
 - Seksi Transmigrasi.
5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahkan :
 - Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Sub Subtansi Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 - Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Sub Subtansi Syarat-

Syarat Kerja Kelembagaan;

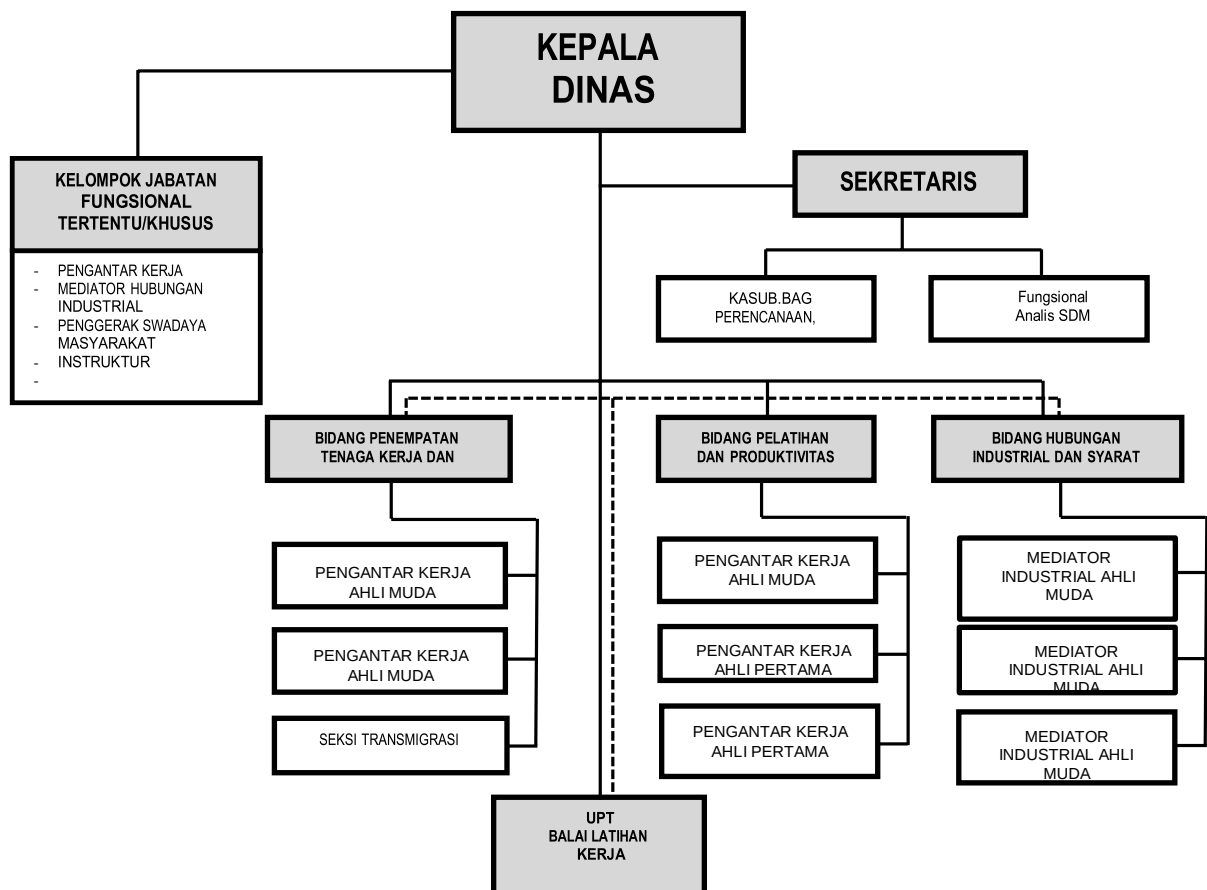
- Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Sub Subtansi Perselisihan Hubungan Industrial.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (Khusus), membawahkan:

- Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
- Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial;
- Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
- Jabatan Fungsional Instruktur.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD BLK), membawahkan :

- Kepala UPTD;
- Sub. Bagian Tata Usaha.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta

Keterangan Bagan:

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta

membawahi langsung:

- I. Sekretaris;
- II. Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
- III. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- IV. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
- V. UPTD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomer 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penempatan tenaga kerja, dan transmigrasi;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
7. pembinaan ketatausahaan dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatas, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dinas;
2. mengelola perencanaan dan program dinas;
3. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dilingkup dinas;
4. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan anggaran dilingkup dinas;
5. melaksanakan fungsi koordinasi terhadap urusan administrasi dilingkup dinas;
6. mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, tata naskah dinas yang masuk maupun yang keluar;
7. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas;
8. mengatur pelaksanaan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup dinas;
9. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga dinas;
10. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan dalam dinas;
11. mengelola administrasi kepegawaian dinas;
12. melaksanakan koordinasi dalam penunjukan Pejabat pembuat Komitmen;
13. melaksanakan pengusulan/ penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara;
14. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan

kepada Bendahara;

15. memantau, mengoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan dinas kepada kepala dinas;
16. menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA dan DPA serta penyusunan LAKIP dinas;
17. mengelola retribusi yang menjadi kewenangan dinas;
18. menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan dinas;
19. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
20. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
21. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
22. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
23. menyusun rencana dan program kerja bidang pelatihan dan produktivitas kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
24. mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup bidang pelatihan dan produktivitas;
25. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pelatihan, pemagangan, standarisasi dan pembinaan produktivitas;
26. menyusun bahan penetapan kebijakan bidang pelatihan dan produktivitas;
27. memberi petunjuk dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan para kepala seksi agar terjalin sinkronisasi dalam pencapaian target kinerja kegiatan;
28. menilai kinerja hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan para Kepala Seksi maupun bawahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
29. memfasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelatihan, pemagangan,

- standarisasi dan pembinaan produktivitas kerja;
30. melaksanakan kebijakan program pelatihan, pemagangan dan upaya peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan;
 31. melaksanakan kebijakan program standarisasi, sertifikasi dan kompetensi kerja;
 32. melaksanakan kebijakan pemasyarakatan produktivitas tenaga kerja;
 33. merumuskan konsep kebijakan teknis yang meliputi pedoman, petunjuk teknis dan peraturan lainnya di bidang Pelatihan dan Produktivitas;
 34. menyusun bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan di bidang pelatihan dan produktivitas;
 35. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang pelatihan dan produktivitas kepada atasan;
 36. melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 37. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
 38. melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
 39. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 40. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya;
 41. menyusun rencana dan program kerja penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 42. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
 43. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
 44. menyusun bahan penetapan kebijakan bidang penempatan

- tenaga kerja dan transmigrasi;
45. memfasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
 46. melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 47. memberi petunjuk, bimbingan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para kepala seksi agar terjalin sinkronisasi dalam pencapaian target kinerja kegiatan;
 48. merumuskan konsep kebijakan teknis yang meliputi pedoman, petunjuk teknis dan peraturan lainnya di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
 49. menyusun bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
 50. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan penempatan, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi kepada atasan;
 51. menyusun RKA dan DPA bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
 52. melaksanakan koordinasi dengan Instansi pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
 53. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 54. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
 55. menyusun rencana dan program kerja bidang hubungan industrial dan syarat kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 56. mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;
 57. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;

58. menyusun bahan penetapan kebijakan bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;
59. memfasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;
60. menyelenggarakan penyuluhan dan monitoring ke perusahaan-perusahaan tentang tata cara pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit;
61. melaksanakan sosialisasi tata cara pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;
62. menyelenggarakan pembinaan kepada serikat pekerja/serikat buruh;
63. melaksanakan verifikasi dan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh;
64. mempersiapkan penyelenggaraan rapat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten;
65. mempersiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten;
66. melaksanakan pembinaan pengupahan;
67. melaksanakan pembinaan pembuatan Perjanjian Kerja (PK);
68. melaksanakan pembinaan pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP);
69. melaksanakan pembinaan pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
70. melaksanakan pembinaan tata cara penyerahan pelaksanaan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain;
71. melaksanakan monitoring / pemantauan pelaksanaan syarat-syarat kerja;
72. melaksanakan pembinaan sarana peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
73. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pengupahan di perusahaan;
74. melaksanakan pembinaan pembuatan struktur dan skala

- upah diperusahaan;
75. melaksanakan pembinaan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan kesehatan tenaga kerja;
 76. melakukan pembinaan dan monitoring penyediaan fasilitas kesejahteraan di perusahaan;
 77. melakukan pembinaan tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum;
 78. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan kepada pekerja dan pengusaha;
 79. memberikan pelayanan dan konsultasi mengenai persyaratan kerja kepada pekerja dan pengusaha;
 80. membantu penyelesaian kasus mogok kerja dan atau penutupan perusahaan (*lockout*);
 81. melaksanakan pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit;
 82. menerima dan melayani pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial;
 83. melaksanakan pencatatan perselisihan hubungan industrial;
 84. mengidentifikasi dan menganalisa kasus perselisihan hubungan industrial;
 85. membuat jadwal dan melaksanakan sidang mediasi;
 86. membuat anjuran tertulis kepada pihak-pihak yang berselisih;
 87. membantu pembuatan perjanjian bersama;
 88. memantau pelaksanaan perjanjian bersama atau anjuran;
 89. melakukan monitoring dan deteksi dini kondisi ketenagakerjaan;
 90. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pembinaan dan kesejahteraan tenaga kerja kepada atasan;
 91. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
 92. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

- tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
93. melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi lain dan/atau lembaga lain tentang pengembangan dan penyelesaian hubungan industrial;
 94. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 95. menyusun rencana dan program kerja UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 96. mengelola pelaksanaan program dan kegiatan kerja UPT;
 97. membina dan mengendalikan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 98. menyusun rencana usulan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja;
 99. menyusun rumusan pola pengembangan dan peningkatan materi dan kegiatan pelatihan kerja;
 100. mengawasi pelaksanaan prosedur dan keselamatan dalam proses kegiatan pelatihan kerja;
 101. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja pada sektor teknik manufaktur, teknik otomotif, teknologi informasi (IT), teknik listrik, teknik refrigerasi, teknik elektronika dan telekomunikasi, teknik bangunan, teknik las, garmen apparel, bisnis manajemen, tata kecantikan, tata busana, pariwisata, pertanian, perikanan, processing, agribisnis, pengolahan kulit, industri kreatif;
 102. menyusun data dan informasi mengenai daftar tenaga kerja yang telah dilatih;
 103. menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja dan pemberian layanan informasi;
 104. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan transmigrasi;
 105. menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan pelatihan

- kepada sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan transmigrasi; (untuk semua bidang dan BLK);
- 106.melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
 - 107.melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam mempermudah pelaksanaan tugas kedinasan;
 - 108.mengusulkan rencana kebutuhan pegawai dan tenaga teknis UPT;
 - 109.melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - 110.mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Potensi sumber daya manusia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada akhir tahun 2024 sebanyak 36 orang pegawai PNS dan 3 Orang PPPK, Menurut golongan pegawai terdiri dari golongan IV sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 24 orang, golongan II sebanyak 10 orang. Menurut jabatan PNS yang berjumlah 36 orang dan 3 orang PPPK terdiri dari pejabat struktural sebanyak 9 orang, fungsional sebanyak 20 orang, dan Administrasi umum sebanyak 10 orang.

Menurut tingkat pendidikan pegawai PNS yang berjumlah 39 orang terdiri dari SD sebanyak 1 orang, SMP sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 8 orang, , D3 sebanyak - orang, , S1 sebanyak 23 orang, S2 sebanyak 6 orang, dan S3 sebanyak 0 orang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi didukung personil/pegawai tahun 2024 sejumlah: 39 orang yang terdiri dari:

1. Pejabat Struktural : 9 orang
2. Pejabat Fungsional : 30 orang
3. Pelaksana : 0 orang

Tabel 1.1
Komposisi Sumberdaya Manusia Berdasar Jabatan
Per 31 Desember 2024

No	Nama Jabatan	Eselon	Laki laki	Perempuan	Jml
1.	Kepala Dinas	II.b	1	0	1
2.	Sekretaris	III.a	0	1	1
3.	Kepala Bidang	III.b	2	1	3
4.	Kepala Seksi	IV.a	0	1	1
5.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV.a	0	1	1
6.	Fungsional Analis SDM	IV.a	1	0	1
7.	Kepala UPTD BLK	IV.a	1	0	1
8.	Kasubbag TU UPTD BLK	IV.b	0	1	1
9.	JF Mediator	-	2	4	6
10.	JF Pengantar Kerja	-	1	3	4
11.	JF Penggerak Swadaya Masyarakat	-	0	0	0
12.	Subkor Pelatihar Produktivitas	-	4	1	5
13.	JF Instruktur	-	14	0	14
14.	Staf PNS		0	0	0
15.	Tenaga Harian Lepas	-	16	8	26
JUMLAH			27	28	65

Sumber Disnaker Tahun 2024

I.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategis dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata keseluruhan masyarakat dapat terwujud.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat disajikan pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Visi : PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH			
Misi : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tenaga kerja Yang Profesional dan	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Meningkatkan Pembinaan dan Produktivitas serta Daya Saing Tenaga	Peningkatan Kualitas SDM
			Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja

Berdaya Saing		Kerja	Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan
Meningkatkan Kapasitas Transmigran yang Produktif dan Mandiri	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Meningkatkan Pembinaan dan Produktivitas serta Daya Saing Transmigran	Peningkatan Kualitas SDM
			Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Reformasi Birokrasi
			Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah

Strategi dan kebijakan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta pada tujuan Menurunkan angka pengangguran dilakukan dengan upaya Kerjasama dengan perusahaan untuk menempatkan tenaga kerja dan melaksanakan padat karya dalam rangka penyerapan tenaga kerja, Merencanakan jenis pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi/teknologi digital. Sedangkan pada tujuan Mewujudkan peningkatan peranan investasi terhadap perekonomian daerah dilaksanakan dengan strategi Penyusunan akurasi data, monitoring, evaluasi dan pemetaan panas bumi dan energi terbarukan dengan upaya

Pendataan, monitoring, evaluasi dan pemetaan panas bumi dan energi terbarukan.

1.3.1 Aspek Strategis Organisasi

Analisis Lingkungan merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi. Analisis lingkungan terdiri dari Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE). Pemahaman terhadap lingkungan internal maupun eksternal akan memberikan pemahaman terhadap organisasi mengenai kondisi dan kemampuan organisasi. Dengan mengetahui kondisi-kondisi internal maupun eksternal organisasi akan diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan keadaan. Adapun Lingkungan Strategis yang berpengaruh terhadap eksistensi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta diantaranya sebagai berikut :

1.3.1.a Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan melalui pencermatan (scaning) lingkungan internal Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan organisasi sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strenght)

- 1) Adanya struktur organisasi yang lengkap dan mencakup seluruh potensi yang ada;
- 2) Lokasi kantor dinas yang strategis;
- 3) Sistem pelayanan administratif kartu pencari kerja (kartu kuning) cepat dan tidak berbelat-belit;
- 4) Adanya Fungsional Pengantar Kerja yang berfungsi untuk melatih, menempatkan calon tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan kompeten di dunia usaha dan dunia industri;

- 5) Adanya Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang berkompeten untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta;
- 6) Adanya Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang berfungsi sebagai penengah atau mediasi bilamana terjadi perselisihan antara pengusaha dan buruh;
- 7) Adanya peraturan teknis di bidang ketenagakerjaan yang cukup lengkap;
- 8) Adanya anggaran yang memadai, baik anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN untuk peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kerja.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Kurangnya dukungan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional khususnya untuk Fungsional Instruktur di UPTD BLK;
- 2) Sistem penempatan AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara) yang belum terintegrasi dengan baik;
- 3) Alat-alat pelatihan yang belum memadai;
- 4) Info Lowongan Pekerjaan bagi pencari kerja masih banyak menggunakan cara konvensional dan belum sepenuhnya diimplementasikan Bursa Kerja On Line (BKOL);
- 5) Asset yang diserahkan oleh pemerintah pusat/propinsi tidak lengkap dan umumnya dalam kondisi rusak serta belum ditunjang dengan perangkat Peraturan Daerah;
- 6) Bangunan kantor kecil dengan sarana yang kurang memadai;
- 7) Kurangnya sosialisasi peraturan ketenagakerjaan di Perusahaan dan Masyarakat;
- 8) Pengawasan terhadap kecelakaan di tempat kerja lemah.

1.3.1.b Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Analisis terhadap lingkungan eksternal dilakukan dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan eksternal organisasi

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi yang memperlihatkan peluang dan ancaman sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunities)

1. Adanya program pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis yang diadakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk tenaga fungsional maupun diklat penjenjangan/ struktural;
2. Banyaknya industri Garmen di Kabupaten Purwakarta dengan sasarannya adalah tenaga kerja wanita golongan ekonomi menengah ke bawah, dimana angka pencari kerja wanita lebih banyak dibanding dengan laki-laki;
3. Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Barat;
4. Minat masyarakat luas dalam menggunakan data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sangat tinggi;
5. Adanya peluang investasi jangka panjang untuk pengembangan kawasan industri di Kabupaten Purwakarta.

b. Ancaman (Threats)

1. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
2. Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial dan masih banyaknya pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan serta masih tingginya angka kecelakaan kerja;
3. Penempatan Tenaga Kerja berbanding Lowongan Kerja di Kabupaten Purwakarta;

Kenaikan inflasi tiap tahun yang berpengaruh terhadap tuntutan upah buruh di Kabupaten Purwakarta. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sebagai upaya mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain

1. Tantangan
 - a. Terbatasnya lapangan pekerjaan lokal;
 - b. Sumber daya manusia yang berkompeten dan bersertifikasi;
 - c. Banyaknya persaingan di dunia kerja yang kompetitif;
 - d. Tuntutan dunia kerja yang lebih maju dan modern.
2. Peluang
 - a. Adanya kesempatan kerjasama pemagangan, kemitraan dengan dunia usaha;
 - b. Adanya penempatan pencari kerja pada lapangan pekerjaan diluar ;
 - c. Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung dalam bidang Ketenagakerjaan.

I.4 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, antara lain : peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 19. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi

- dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 28. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Purwakarta Tahun 2024 -2026;
 29. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta;

I.5 SISTEMATIKA

Adapun sistematika dalam penulisan LKIP Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta didasarkan pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahunan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada, Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk kurun waktu tiga tahun 2024-2026 .

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan. Oleh karena itu, visi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta, pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat daerah telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari Misi Kabupaten Purwakarta, yaitu : “ **PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH** ”. Berdasarkan perumusan visi Kabupaten Purwakarta tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi umum Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta serta perkiraan potensi yang dapat dikembangkan di masa datang, maka dirumuskan **VISI KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWAKARTA** adalah : **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat”**.

2.1.1. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Purwakartasebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam misi, yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial”**

Untuk meningkatkan kualitas Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, maka dilakukan reviu Renstra secara berkala. berikut merupakan Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik, terukur, sehingga menjadi pedoman dan sasaran kinerja bagi unsur Dinas, sedangkan tujuan dari misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta yaitu :

a. Tujuan:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kapasitas Transmigran yang Produktif dan Mandiri;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.

b. Sasaran:

1. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja;
2. Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Tabel 2.1
Misi dan Tujuan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024 - 2026

Misi	Tujuan
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat	1. Meningkatkan Kualitas Tenaga kerja Yang Profesional dan Berdaya Saing; 2. Meningkatkan Kapasitas Transmigran yang Produktif dan Mandiri; 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Sasaran	Indikator
Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kimpetensi
Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih
	Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.3
Strategi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024-2026

Strategi
Meningkatkan Pembinaan dan Produktivitas serta Daya Saing Tenaga Kerja
Meningkatkan Pembinaan dan Produktivitas serta Daya Saing Transmigran
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

II.2 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya untuk memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Misi adalah Mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta melalui peningkatan kualitas SDM aparatur. Urusan yang terkait dengan misi ini pada khususnya adalah urusan yang berhubungan dengan pelayanan publik, namun secara umum misi ini terkait dengan etos kerja dan profesionalisme aparatur yang ada di seluruh jajaran pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta. Strategi dan Arah Kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, yaitu :

RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi					
1.1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi					
		Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan					
		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi					
		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat					

		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan					
1.1.1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi						
1.1.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Melaksanakan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi				
1.1.1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pada Tahun n	Melaksanakan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				
1.1.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						
1.1.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	Melaksanakan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				
1.1.3	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil						
1.1.3.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil Yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Melaksanakan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil				
1.2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar					

		Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota					
1.2.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						
1.2.1.1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Melaksanakan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja				
1.2.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						
1.2.2.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Melaksanakan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				
1.2.2.2	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Melaksanakan Job Fair/Bursa Kerja				
1.2.3	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						
1.2.3.1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI Yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Melaksanakan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				
1.2.3.2	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna Yang Diberdayakan	Melaksanakan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				

1.3	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
		Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun					
		Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)					
		Keselamatan dan Perlindungan					
		Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek					
1.3.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
1.3.1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja Yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek Serta Pengupahan	Melaksanakan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan				

1.3.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						
1.3.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Yang Dicegah	Melaksanakan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1.3.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan Yang terselesaikan	Melaksanakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Persentase Calon Transmigran Yang Dibina/Dilatih					
		Persentase Kemandirian Transmigran di Satuan Permukiman					
2.1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran Swakarsa					
		Persentase Calon Transmigran Yang Dibina/Dilatih					

		Persentase Transmigran Yang Diberangkatkan					
2.1.1	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
2.1.1.1	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi				
2.2	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kemandirian Transmigran di Satuan Permukiman					
2.2.2	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian						
2.2.2.1	Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran Yang Dibina	Melaksanakan Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman				
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah					
		Indeks Kepuasan Masyarakat					
3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah					
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Renstra, Renja Murni dan Renja Perubahan				

3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
3.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
3.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
3.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
3.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan LAKIP				
3.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				

3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Membuat SPP/SPM Gaji dan Tunjangan				
3.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
3.1.2.3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Melaksanakan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
3.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						
3.1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Melaksanakan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD				
3.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
3.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
3.1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Memfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
3.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah						

3.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Menyediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
3.1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga				
3.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Menyediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
3.1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Menyediakan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
3.1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menyelenggarakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
3.1.4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD				
3.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
3.1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Melaksanakan Pengadaan Mebel				
3.1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

3.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
3.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
3.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Melaksanakan Pembayaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
3.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
3.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
3.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
3.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

3.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
3.1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
3.1.7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				

2.1.4 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta 3 (Tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke		
			2021	2022	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Tenaga kerja Profesional dan Berdaya Saing	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,00 %	69,06 %	69,06 %	69,06 %	69,06 %
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kimpetensi	0,00 %	69,06 %	69,06 %	69,06 %	69,06 %
Meningkatkan Kapasitas Transmigran yang Produktif dan Mandiri	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	0,00 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	0,00 %	0,00 %	100 %	100 %	100 %
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	B	BB	BB	BB	BB
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan

dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan Tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Berikut Rencana Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.5

Tabel 2.5
Rencana Kinerja T a h u n a n Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke			
			2020	2021	2022	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Tenaga kerja Yang Profesional dan Berdaya Saing	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,00	0,00 %	69,06 %	69,06 %	69,06 %	69,06 %
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kimpetensi	0,00	0,00 %	69,06 %	69,06 %	69,06 %	69,06 %
Meningkatkan Kapasitas Transmigran yang Produktif dan Mandiri	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	0,00	0,00 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Kemandirian Transmigrasi di Satuan Permukiman	0,00	0,00 %	0,00 %	100 %	100 %	100 %
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Rencana kinerja program untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tabel 2.6. berikut ini

Tabel. 2.6.
Rencana Kinerja Program Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2024	2025	2026	
1.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	69,06 %	69,06 %	69,06 %	100
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kimpetensi	69,06 %	69,06 %	69,06 %	100
3.	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	100 %	100 %	100,00	100
4.	Persentase Kemandirian Transmigrasi di Satuan Permukiman	100 %	100 %	100,00	100
5.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik

II.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reuiu

instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan PD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Purwakarta sebagai pemberi amanah dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah : Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadinya pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan :
 - Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

NO	SASARAN	IKU	TARGET	SATUAN
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	69,06	%
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	69,06	%
2.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	100	%
		Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	100	%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	Predikat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Predikat

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 10.570.845.611	
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.645.000.000	
3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 456.250.000	
4. Program Hubungan Industrial	Rp. 370.000.000	
5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 425.000.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja financial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	> 85 -100%	Baik
3.	> 65 — 85%	Cukup
4.	> 50 - 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat kurang

Dalam laporan ini, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta dapat memberikan gambaran penilaian kelompok indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 yang terdapat pada Misi Ketiga Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

Adapun analisa dari sasaran strategis tersebut dalam mencapai misi Bupati serta tujuan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta yaitu Menurunkan angka Pengangguran pada Tahun 2024.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN INI

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung dengan pengembangan pengukuran capaian sakin yang diukur dengan 1 (satu) Tujuan / sasaran dan 2 (dua) indikator, pertama persentase capaian sakin merupakan gambaran capaian sakin yang mempunyai keterampilan dalam pekerjaan. Untuk mendukung pelaporan, penyusunan keterampilan dan kemampuan capaian sakin ini didukung oleh 1 program.

Sasaran Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung dengan pengembangan pengukuran yang diukur dengan 1 (satu) Tujuan / sasaran dan 2 (dua) indikator, pertama Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih dan kedua Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman yang mempunyai keterampilan dalam pekerjaan. Untuk mendukung keterampilan dan kemampuan capaian sakin ini didukung oleh 1 program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Sasaran Peningkatan keterserapan Produktivitas Tenaga kerja didukung dengan pengembangan produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang diukur dengan 1 (satu) Tujuan / sasaran dan 2 (dua) indikator, persentase keterserapan Produktivitas tenaga kerja tahun 2023 sebesar 0,40% dan Tahun

2024 sebesar 69,06% merupakan gambaran produktivitas pencari kerja yang mempunyai keterampilan dalam pekerjaan. Untuk mendukung keterampilan dan kemampuan pencari kerja indikator ini didukung oleh 1 program dan 6 kegiatan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai indikator ini antara lain, pendidikan dan pelatihan keterampilan, pemagangan. Capaian peningkatan keterserapan Produktivitas tenaga kerja dihitung dengan rumus: $((\text{jumlah penempatan tenaga kerja} / \text{jumlah pencari kerja yang terdaftar} \times 100\%) + (\text{Jumlah peserta Pelatihan yang terserap} / \text{jumlah pelatihan} \times 100\%)) / 2$

Pada tahun 2023 capaian Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 0,40% dan tahun 2024 ini capaian keterserapan Produktivitas tenaga kerja mencapai 69,06% capaian kinerja 100% dengan predikat baik manyamakan target yang ditetapkan yakni sebesar 69,06% hal ini dapat dicapai dengan banyaknya peserta pelatihan dan pencari kerja yang ditempatkan Pada tahun 2024 tujuan dan sasaran ini ditampilkan dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun ini

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	69,06	69,06	100		IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	69,06	69,06	100		
2.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	100	100	100		
		Persentase kemandirian transmigran di satuan	100	100	100		

		permukiman					
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	69,06	69,06	100		

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN BEBERAPA TAHUN SEBELUMNYA

Sasaran Peningkatan keterserapan Produktivitas Tenaga kerja didukung dengan pengembangan produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang diukur dengan 1 (satu) Tujuan / sasaran dan 2 (dua) indikator, persentase keterserapan Produktivitas tenaga kerja tahun 2023 sebesar 50,40% dan Tahun 2024 sebesar 69,06% merupakan gambaran produktivitas pencari kerja yang mempunyai keterampilan dalam pekerjaan. Untuk mendukung keterampilan dan kemampuan pencari kerja indikator ini didukung oleh 1 program dan 6 kegiatan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai indikator ini antara lain, pendidikan dan pelatihan keterampilan, pemagangan. Capaian peningkatan keterserapan Produktivitas tenaga kerja dihitung dengan rumus: $((\text{jumlah penempatan tenaga kerja} / \text{jumlah pencari kerja yang terdaftar} \times 100\%) + (\text{Jumlah peserta Pelatihan yang terserap} / \text{jumlah pelatihan} \times 100\%)) / 2$ Pada tahun 2023 capaian Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 50,40% dan tahun 2024 ini capaian keterserapan Produktivitas tenaga kerja mencapai 69,06% capaian kinerja 100% dengan predikat baik menyamakan target yang ditetapkan yakni sebesar 69,06% hal ini dapat dicapai dengan banyaknya peserta pelatihan dan pencari kerja yang ditempatkan Pada tahun 2024 tujuan dan sasaran ini.

Sasaran Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung dengan pengembangan pengukuran yang diukur dengan 1 (satu) Tujuan / sasaran dan 2 (dua) indikator, pertama Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih dan kedua Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman yang mempunyai keterampilan dalam pekerjaan. Untuk mendukung keterampilan dan kemampuan capaian sakip ini didukung oleh 1 program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung dengan pengembangan pengukuran capaian sakip yang diukur dengan 1 (satu) Tujuan / sasaran dan 2 (dua) indikator, pertama persentase capaian sakip merupakan gambaran capaian sakip yang mempunyai keterampilan dalam pekerjaan. Untuk mendukung pelaporan, penyusunan keterampilan dan kemampuan capaian sakip ini didukung oleh 1 program ditampilkan dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	50,40	50,40	100	69,06	69,06	100
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	50,40	50,40	100	69,06	69,06	100
2.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	100	100	100	100	100	100
		Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	Baik	BB	BB	BB
		Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

	Masyarakat terhadap Penyeleng garaan Pemerinta han Daerah	Kepuasan Masyarakat						
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

C. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN INI DENGAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD . Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran ini ditampilkan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Target Rencana Pembangunan
Daerah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir RPD (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	69,06	69,06	100
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	69,06	69,06	100
2.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	100	100	100
		Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	100	100	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NAS/PROV/KAB

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mempedomani pada visi misi RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026. Dalam perkembangannya pada satu tahun berjalan dimungkinkan adanya perkembangan lain yang berkaitan dengan ketersediaan dana, target kinerja, sasaran dan lain-lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan daerah harus terintegrasi dengan berbagai program yang dirancang oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, artinya bahwa berbagai program yang dirancang diharapkan agar tidak tumpang tindih namun saling mendukung. Secara umum, keterkaitan dengan adanya Perubahan Renja Tahun 2024 pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta adalah untuk mengakomodir perkembangan perubahan sasaran kegiatan guna peningkatan pelayanan publik dan percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Di dalam bab ini dipaparkan secara umum tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan terkait dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Hal ini sejalan dengan program nasional yang dijalankan oleh pemerintah bahwa perlunya dilakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia baik pada pengenalan berupa program dan kegiatan yang dilakukan sampai kepada tingkat OPD. Program dan kegiatan yang direncanakan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk mencapai kinerja yang diinginkan yang sesuai dengan sasaran daerah yang telah diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Kabupaten / Provinsi / Kab lain	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	69,06	81,02	85,23821
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	69,06	81,02	85,23821
2.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	100	100	100

		Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	100	100	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	80,30	90,2	89,02439
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,14	90,68	99,605

Pada kolom 1 tujuan meningkatnya Produktifitas dan daya saing kerja dengan indikator Tingkat Produktivitas Tenaga kerja Persentase realisasi yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 69,06 % dengan membandingkan dengan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jaawa barat tingkat Produktivitas tenaga kerja dengan persentase yang dicapai 81,02 % Hal ini terlihat perbandingan capaian antara Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Purwakarta dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan persentase capaian 85,23821 %.

Pada kolom 2 tujuan meningkatnya Produktifitas dan daya saing kerja dengan indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Persentase realisasi yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 69,06 % dengan membandingkan dengan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jaawa Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dengan persentase yang dicapai 81,02 % Hal ini terlihat perbandingan capaian antara Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Purwakarta dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan persentase capaian 85,23821 %.

Pada kolom 3 tujuan Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran dengan indikator Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih Persentase realisasi yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 100 % dengan membandingkan dengan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jaawa barat Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih dengan persentase yang dicapai 100 % Hal ini terlihat perbandingan capaian antara Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Purwakarta dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan persentase capaian 100 %.

Pada kolom 4 tujuan Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran dengan Indikator Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman Persentase realisasi yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 100 % dengan membandingkan dengan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jaawa barat Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman dengan persentase yang dicapai 100 % Hal ini terlihat perbandingan capaian antara Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Purwakarta dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan persentase capaian 100 %.

Pada kolom 5 tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase realisasi yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 80,30% dengan membandingkan dengan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jaawa barat Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan dengan realisasi yang dicapai 90,2% Hal ini terlihat perbandingan capaian antara Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Purwakarta dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan persentase capaian mencapai 89,02439%.

Pada kolom 6 tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 91,14% dengan membandingkan dengan data Kabupaten Purwakarta Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan persentase yang dicapai 90,68% Hal ini terlihat perbandingan capaian antara Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Purwakarta dengan IKM Kabupaten Purwakarta dengan persentase capaian mencapai 99,605%.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSINYA

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian Tujuan sasaran dan indikator dari 3 Tujuan / Sasaran dan 6 Indikator adalah optimalnya Pencapaian Target dan realisasi. Sedangkan Tujuan / Sasaran **Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja** dengan indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja mencapai

target 69,06 dengan realisasi 69,06 dengan capaian 100 % dan indikator Persentase Tenaga kerjabersertifikat kompetensi dengan target 69,06 dengan capaian realisasi 69,06 dan capaian 100%.

Tujuan / Sasaran **Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran** dengan indikator Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih mencapai target 100% dengan realisasi 100% dengan capaian 100 % dan Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman dengan target 100% dengan capaian realisasi 100% dan capaian 100%.

Tujuan / Sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat** dengan indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah mencapai target 80,30 dengan realisasi 80,30 dengan capaian 100 % dan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 91,14% dengan capaian realisasi 91,14% dan capaian 100%. Penjelasan tersebut menerangkan dalam rangkuman sesuai tabel 3.6.

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	69,06	69,06	100	Keberhasilan : Dalam melaksanakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di Disnakertrans dilakukan dengan sabar sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik Kegagalan : pada survei ini terendah pada responnya	Melakukan pertemuan dengan para perusahaan untuk bisa bersinergi dengan Disnakertrans masalah tenaga kerja
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	69,06	69,06	100	Keberhasilan : Dalam melaksanakan Pelatihan di Disnakertrans dilakukan Seleksi dengan sabar sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik Kegagalan :	Memberikan informasi kepada publik untuk bisa ikut serta dalam kepelatihan yang

						Disaat mengadakan pelatihan tidak ada yang mengikuti ataupun kurang pendaftar nya	akan dilakukan Disnakertrans
2.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	100	100	100	Keberhasilan : Dalam melaksanakan Penerimaan Calon Transmigran dilayani dengan baik dan dilatih dengan sabar Kegagalan : pada saat seleksi calon transmigrasi yang akan di latih tidak ada calon transmigran nya	Melakukan seleksi yang sesuai dengan aturan pemerintah
		Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	100	100	100	Keberhasilan : Dalam melaksanakan kemandirian transmigran yang akan di berangkatkan mendapatkan tempat yang sangat baik untuk satuan permukiman nya Kegagalan : Tidak mendapatkan kuota dari provinsi untuk memberangkatkan transmigran nya	Mengajukan kuota untuk memberangkatkan transmigran kabupaten Purwakarta kepada Provinsi
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	80,30	80,30	100	Keberhasilan: Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun perlu adanya penyempurnaan dokumen- dokumen	Kedepannya, dalam penyusunan laporan akan melampirkan kertas kerja dari masing-masing bidang yang mencakup semua elemen penting, seperti periode pelaporan dan ringkasan pencapaian kinerja.

						perjanjian kinerja (PK) penetapan indikator	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,14	91,14	100	Keberhasilan : Dalam melaksanakan pelayanan disosialisasi Disnakertrans diatau lakukan dengan memberikan senyum, sapa dan info melalui sabar sehingga media sosial masyarakat merasa mengenai dilayani dengan baik SOP Kegagalan : pada survey ini waktu terendah pada proses responden layanannya (pemahaman dan kemudahan dalam pelayanan)	Melaksanakan

F. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja dicapai dengan adanya dukungan beberapa faktor sumberdaya yang sangat berperan aktif baik dari ketersediaan SDM dan Anggaran. Dalam Pelaksanaan Program kegiatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta didukung SDM yang kompeten dibidangnya seperti Tenaga fungsional Pengantar kerja serta instruktur pengajar yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja. Disamping itu adanya dukungan anggaran APBN maupun APBD juga sangat menentukan pencapaian target kinerja pada Tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.680.000.000,- dengan jumlah 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja. Pencapaian target sasaran strategis 1 ini, dilaksanakan oleh Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja serta UPTD BLK Purwakarta. Secara Rinci dapat dijelaskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis 1 pada tabel 3.7 berikut :

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian Tujuan sasaran dan indikator dari 3 Tujuan / Sasaran dan 6 Indikator adalah optimalnya kerjasama Pegawai. Sedangkan program yang mendukung capaian indikator ini adalah Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Anggaran sebesar Rp. 10.570.845.611,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.328.801.755,-. Efisiensi sebesar Rp **1.098.706.724,-** atau 10,54 %, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Anggaran sebesar Rp. 1.645.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.637.218.000,-. Efisiensi sebesar Rp **7.782.000,-** atau 0,46 %, Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Anggaran sebesar Rp. 456.250.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 455.949.000,-. Efisiensi sebesar Rp **301.000,-** atau 0,06 %, Program Hubungan Industrial dengan Anggaran sebesar Rp. 370.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 328.638.000,-. Efisiensi sebesar Rp **41.362.000,-** atau 11,18 %, dan Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan Anggaran sebesar Rp. 425.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 408.092.000,-. Efisiensi sebesar Rp **16.908.000,-** atau 16,91 %, penjelasan tersebut menerangkan dalam rangkuman sesuai tabel 3.7.

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	69,06	69,06	100	1.645.000.000	1.637.218.000,-	99,54	0,46
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	69,06	69,06	100	1.645.000.000,-	1.637.218.000,-	99,54	0,46
2.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	100	100	100	425.000.000	408.092.000,-	83,09	16,91
		Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	100	100	100	425.000.000	408.092.000,-	83,09	16,91
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	80,30	80,30	100	10.570.845.611	9.328.801.755,-	89,46	10,54

terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,14	91,14	100	10.570.845.611	9.328.801.755,-	89,46	10,54
--	----------------------------	-------	-------	-----	----------------	-----------------	-------	-------

Dari tabel 3.7 di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya melalui Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Tujuan / sasaran 3 (satu) yaitu Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran, Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator sebanyak 6 indikator yaitu Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih, Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman, Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Tabel diatas menunjukan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja mempunyai 2 indikator sasaran yaitu Persentase Keterserapan Tenaga Kerja, kedua Terlaksananya Produktivitas tenaga kerja dengan tingkat capaian rata-rata lebih dari 100%. Berdasarkan hasil analisis faktor keberhasilan pencapaian kinerja, faktor kegagalan pencapaian kinerja, rencana/solusi tindak lanjut yang akan datang antara lain:

1. Faktor Keberhasilan pencapaian kinerja:
 - Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, meningkatnya penempatan tenaga kerja ;
 - Meningkatnya keterampilan tenaga kerja dengan kebijakan yang diarahkan pada: Peningkatan pelayanan kinerja dan Keuangan, Peningkatan penyebaran informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja.
2. Faktor kegagalan pencapaian kinerja :
 - Era Revolusi Industri modern berdampak positif dan negatif kaitannya dengan bidang ketenagakerjaan, Era tersebut memang memunculkan jenis jabatan/pekerjaan baru namun juga menghilangkan jenis/pekerjaan

lama yang sudah ada. Teknologi Informasi sangat berpengaruh terhadap proses produksi di perusahaan sehingga menyebabkan pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia menjadi dilakukan secara Komputerisasi. Oleh karena itu Pencari Kerja juga harus respon terhadap perkembangan zaman.

- Rendahnya minat bekerja di daerah sendiri dikarenakan UMK rendah
- Adanya Informasi lowongan pekerjaan baik dalam dan luar negeri lewat media sosial yang kurang dapat dipertanggung jawabkan.
- Terbatasnya Kuota Transmigrasi dari Pemerintah Pusat untuk Calon transmigrasi Kabupaten.
- Daya dukung pemerintah daerah pengirim maupun lokasi transmigrasi yang masih rendah.
- Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan pusat dalam penyelenggaraan transmigrasi

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Dan Kegiatan

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	69,06	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	99,54	Melalui pelaksanaan program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja telah dilaksanakan masing-masing sebanyak 2 (dua) Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun capaian indikator dari program ini yaitu besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 69,06 % dimana sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 99,54 % dengan kata lain hasil dari capaian program ini dapat menunjang keberhasilan.
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	69,06	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	99,54	Melalui Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, target dari pada indikator yang ingin dicapai adalah Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, dimana melalui Renja telah ditetapkan sebesar 69,06 % sampai dengan triwulan ke IV hasil dari capaian pelaksanaan kegiatan ini masih 99,54 % dimana sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi sebesar 99,54 % dengan kata lain hasil dari capaian program ini dapat menunjang keberhasilan.
2.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	100	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	100	Melalui Meningkatkan Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran, target dari pada indikator yang ingin dicapai adalah Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih, dimana melalui Renja telah ditetapkan sebesar 100 % sampai dengan triwulan ke IV hasil mempertahankan capaian pelaksanaan kegiatan ini masih 100 % dimana sampai dengan triwulan ke IV tetap terealisasi sebesar 100 % dengan kata lain hasil dari capaian program ini dapat menunjang keberhasilan dalam mempertahankan Target.

		Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	100	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	100	Melalui Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran, target dari pada indikator yang ingin dicapai adalah Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman, dimana melalui Renja telah ditetapkan sebesar 100 % sampai dengan triwulan ke IV hasil mempertahankan capaian pelaksanaan kegiatan ini masih 100 % dimana sampai dengan triwulan ke IV tetap terealisasi sebesar 100 % dengan kata lain hasil dari capaian program ini dapat menunjang keberhasilan dalam mempertahankan Target.
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	Melalui Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, target dari pada indikator yang ingin dicapai adalah Capaian SAKIP Perangkat Daerah dimana melalui Renja telah ditetapkan Predikat BB sampai dengan triwulan ke IV hasil mempertahankan capaian pelaksanaan kegiatan ini masih Predikat BB dimana sampai dengan triwulan ke IV tetap terealisasi sebesar Predikat BB dengan kata lain hasil dari capaian program ini dapat menunjang keberhasilan dalam mempertahankan Target.
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Untuk menunjang, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP, Dalam memberikan pelayanan di lakukan dengan senyum, sapa dan sabar sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik , Disediakan bacaan di ruang tunggu dan Dilakukan komunikasi dengan baik dengan pemohon apabila persyaratan kurang lengkap

III.2 REALISASI ANGGARAN

Tahun anggaran 2024 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta melaksanakan program kegiatan sub.kegiatan dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 13.083.758.479,- yang terdiri dari Urusan Pemerintah Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga kerja sejumlah Rp.1.680.000.000,- Bidang Penempatan Tenaga Kerja sejumlah Rp. 506.520.000,- Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sejumlah Rp.370.000.000,- Realisasi total anggaran belanja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah Rp.11.918.698.755 Atau 91,10% dari total anggaran Rp. 13.083.758.479,- Realisasi anggaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta tertuang tabel 3.9 Berikut ini, dan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.10

Tabel 3.9

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten
Purwakarta

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi	
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik
SEKRETARIAT		10.427.508.479	9.328.801.755	89,46%	51,22%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	69.764.800	99,66%	100,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.872.865.587	6.158.382.691	89,60%	66,67%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	14.800.000	14.800.000	100,00%	100,00%

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.000.000	78.690.000	65,58%	5,88%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.001.903	362.650.700	90,66%	100,00%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000.000	499.410.000	99,88%	100,00%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.226.280.024	1.002.505.930	81,75%	100,00%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.223.560.965	1.142.597.634	93,38%	72,73%
BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		1.680.000.000	1.672.218.000	99,54%	65,62%
9	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1.575.000.000	1.571.993.000	99,81%	73,73%
10	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000	20.000.000	100,00%	100,00%
11	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	85.000.000	80.225.000	94,38%	100,00%
BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA		506.250.000	505.949.000	99,94%	121,08%
12	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100,00%	100,00%
13	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	231.250.000	231.150.000	99,96%	140,11%

14	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000	224.799.000	99,91%	139,16%
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA		370.000.000	328.638.000	88,82%	77,78%
15	Pengesahaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	78.796.000	78,80%	100,00%
16	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000	249.842.000	92,53%	76,00%
SEKSI TRANSMIGRASI		100.000.000	83.092.000	83,09%	100,00%
17	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93.880.000	76.972.000	81,99%	100,00%
18	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	6.120.000	6.120.000	100,00%	100,00%
TOTAL		13.083.758.479	11.918.698.755	91,10%	108,51%

Rincian Realisasi kinerja program dan kegiatan dan anggaran pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.10

Tabel.3.10

Rincian Realisaasi Kinerja Program dan Kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi	
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik
SEKRETARIAT		10.427.508.479	9.328.801.755	89,46%	51,22%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	69.764.800	99,66%	100,00%
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.985.900	99,86%	100,00%
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	9.991.700	99,92%	100,00%
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	9.962.100	99,62%	100,00%
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	9.949.100	99,49%	100,00%
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00%	100,00%

-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.938.000	99,38%	100,00%
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.938.000	99,38%	100,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.872.865.587	6.158.382.691	89,60%	66,67%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.852.865.587	6.148.414.091	89,72%	100,00%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.968.600	99,69%	100,00%
-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000	-	0,00%	0,00%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	14.800.000	14.800.000	100,00%	100,00%
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	14.800.000	14.800.000	100,00%	100,00%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.000.000	78.690.000	65,58%	5,88%

-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.000.000	69.880.000	99,83%	100,00%
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	8.810.000	17,62%	3,03%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.001.903	362.650.700	90,66%	100,00%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	20.097.700	40,20%	100,00%
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000	74.999.000	100,00%	100,00%
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	92.864.000	92,86%	100,00%
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	49.815.000	99,63%	100,00%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.001.903	114.875.000	99,89%	100,00%
-	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00%	100,00%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000.000	499.410.000	99,88%	100,00%
-	Pengadaan Mebel	200.000.000	199.550.000	99,78%	100,00%

-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000	299.860.000	99,95%	100,00%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.226.280.024	1.002.505.930	81,75%	100,00%
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100,00%	100,00%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	347.705.920	281.758.326	81,03%	100,00%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	872.574.104	714.747.604	81,91%	100,00%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.223.560.965	1.142.597.634	93,38%	72,73%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.900.000	74.556.700	77,74%	83,33%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	70.000.000	23.694.200	33,85%	50,00%

	Operasional atau Lapangan				
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	14.510.000	72,55%	78,13%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	450.000.000	445.179.583	98,93%	100,00%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	437.660.965	435.217.483	99,44%	100,00%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	149.439.668	99,63%	100,00%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, sasaran strategis dan indikator keberhasilan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari indikator kinerja yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 indikator berhasil tercapai yakni indikator Capaian Peningkatan Keterserapan Tenaga Kerja yang belum tercapai Terlaksananya Penempatan Transmigrasi oleh karena perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk data capain kinerja ada pada tabel dibawah ini:

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Katagori
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	69,06	69,06	100	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	69,06	69,06	100	
2.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	100	100	100	
		Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	100	100	100	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	Predikat	

	Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Predikat	
--	--	----------------------------	------	------	----------	--

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 10.570.845.611	
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.645.000.000	
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 456.250.000	
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 370.000.000	
5.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 425.000.000	

B. PERMASALAHAN

Permasalahan atau kendala yang dihadapi pada tahun 2024 berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan, urusan transmigrasi adalah:

1. Optimalisasi sistem antar kerja untuk meningkatkan serapan pekerja formal dan melakukan pemberdayaan tenaga kerja agar dapat bekerja secara mandiri. Dengan demikian TPT dapat diturunkan.
2. Kualitas pekerja yang relatif masih rendah ini disebabkan karena rendahnya pendidikan atau masih ada keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja.
3. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki.
4. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.
5. Kualitas angkatan kerja yang rendah hal ini disebabkan karena kurangnya ketrampilan, kurangnya kompetensi, dan kurangnya daya juang.
6. Kuota Penempatan Transmigrasi dari Provinsi Jawa Barat untuk pada Tahun 2024 hanya 2 KK sehingga tidak dapat memenuhi target

prosentase Transmigran yg ditempatkan, Transmigrasi merupakan program given dari Provinsi Jawa Barat sehingga hanya dapat melaksanakan penempatan transmigrasi sesuai alokasi kuota transmigrasi.

C. LANGKAH PERBAIKAN YANG AKAN DATANG

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, dan tentunya tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara dini dan diatasi sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi pada setiap bidang kerja dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi horizontal ,vertikal dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dan penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk tahun anggaran berikutnya;
2. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka meyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan;
3. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan;
4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan dengan pemagangan;
5. Meningkatkan pelayanan publik melalui sistim penempatan tenaga kerja Bursa Kerja Online melalui aplikasi elektronik e-makaryo untuk memperluas penempatan tenaga kerja;
6. Pemberdayaan Pekerja Migran Purna Penempatan;
7. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan OPD Lintas Sektor dan Pemerintah pusat;

8. peningkatan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat dan dilakukan monitoring serta seleksi bagi kelompok-kelompok yang sudah layak untuk bisa mendapatkan pembinaan dari OPD terkait;
9. Koordinasi dan komunikasi internal Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta secara lebih insentif;
10. Koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat penambahan kuota transmigrasi.

Akhirnya dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 .

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Jl. Veteran No. 03 Ciseureuh – Purwakarta 41118 Telp. (0264) 200459

E-mail : Disnakertranspurwakarta@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIDI GARNADI, S.Pd, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BENNI IRWAN**

Jabatan : Pj. Bupati Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA

BENNI IRWAN

Pihak Pertama

DIDI GARNADI, S.Pd, MM
NIP. 197203 19199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saling Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	69,06 69,06
2	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Bagi Transmigran	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	100 100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	BB Baik

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 10.570.845.611	
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.645.000.000	
3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 456.250.000	
4. Program Hubungan Industrial	Rp. 370.000.000	
5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 425.000.000	

PIHAK KEDUA



[Signature]
BENNI IRWAN

Purwakarta, Januari 2024

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWAKARTA



[Signature]
DIDI GARNADI, S.Pd, MM
NIP. 197203 19199903 1 001

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWAKARTA

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		
SEKRETARIAT		10.427.508.479	9.328.801.755	89,46%	51,22%		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	69.764.800	99,66%	100,00%		
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.985.900	99,86%	100,00%	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Daerah
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	9.991.700	99,92%	100,00%	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	9.962.100	99,62%	100,00%	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dan H Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	9.949.100	99,49%	100,00%	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00%	100,00%	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dan L Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.938.000	99,38%	100,00%	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Ikhtisar Laporan Laporan Realisasi
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.938.000	99,38%	100,00%	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.872.865.587	6.158.382.691	89,60%	66,67%		
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.852.865.587	6.148.414.091	89,72%	100,00%	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tunjangan
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.968.600	99,69%	100,00%	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah SKPD Penyusunan Tahun
-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000	-	0,00%	0,00%	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan Pemeriksaan

3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	14.800.000	14.800.000	100,00%	100,00%	
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	14.800.000	14.800.000	100,00%	100,00%	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.000.000	78.690.000	65,58%	5,88%	
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.000.000	69.880.000	99,83%	100,00%	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	8.810.000	17,62%	3,03%	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.001.903	362.650.700	90,66%	100,00%	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	20.097.700	40,20%	100,00%	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000	74.999.000	100,00%	100,00%	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	92.864.000	92,86%	100,00%	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	49.815.000	99,63%	100,00%	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.001.903	114.875.000	99,89%	100,00%	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
-	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00%	100,00%	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000.000	499.410.000	99,88%	100,00%	
-	Pengadaan Mebel	200.000.000	199.550.000	99,78%	100,00%	Tersedianya Mebel
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000	299.860.000	99,95%	100,00%	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.226.280.024	1.002.505.930	81,75%	100,00%	
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100,00%	100,00%	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	347.705.920	281.758.326	81,03%	100,00%	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ju Ka Y:
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	872.574.104	714.747.604	81,91%	100,00%	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ju Pe Di
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.223.560.965	1.142.597.634	93,38%	72,73%		
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.900.000	74.556.700	77,74%	83,33%	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Operasional Dinas Jabatan	Ju Ka da
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	23.694.200	33,85%	50,00%	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ju La Di
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	14.510.000	72,55%	78,13%	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ju Ya
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	450.000.000	445.179.583	98,93%	100,00%	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ju La
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	437.660.965	435.217.483	99,44%	100,00%	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ju Ka Di
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	149.439.668	99,63%	100,00%	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ju Ge Ya
BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		1.680.000.000	1.672.218.000	99,54%	65,62%		
9	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1.575.000.000	1.571.993.000	99,81%	73,73%		
-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.250.000.000	1.247.253.000	99,78%	34,48%	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Ju Pe Ta
-	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	325.000.000	324.740.000	99,92%	100,00%	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Ju Ra da Pe Ta
10	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000	20.000.000	100,00%	100,00%		
-	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000	20.000.000	100,00%	100,00%	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Ju Ya
11	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	85.000.000	80.225.000	94,38%	100,00%		
-	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	85.000.000	80.225.000	94,38%	100,00%	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Ju Ko

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA		506.250.000	505.949.000	99,94%	121,08%		
12	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100,00%	100,00%		
-	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	50.000.000	50.000.000	100,00%	100,00%	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jun Per
13	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	231.250.000	231.150.000	99,96%	140,11%		
-	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	22.000.000	22.000.000	100,00%	155,50%	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jun Ter Sis
-	Job Fair/Bursa Kerja	209.250.000	209.150.000	99,95%	58,00%	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jun Pek
14	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000	224.799.000	99,91%	139,16%		
-	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100.000.000	99.949.000	99,95%	143,33%	Terlaksananya Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jun Dit
-	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	125.000.000	124.850.000	99,88%	100,00%	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jun
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA		370.000.000	328.638.000	88,82%	77,78%		
15	Pengesahaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	78.796.000	78,80%	100,00%		
-	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	100.000.000	78.796.000	78,80%	100,00%	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja Yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek Serta Pengupahan	Jun (PP Bipi Seb Per
16	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000	249.842.000	92,53%	76,00%		
-	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000	209.322.000	95,15%	76,00%	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jun

-	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	40.520.000	81,04%	76,00%	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terserap
SEKSI TRANSMIGRASI		100.000.000	83.092.000	83,09%	100,00%		
17	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93.880.000	76.972.000	81,99%	100,00%		
-	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	93.880.000	76.972.000	81,99%	100,00%	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Dila
18	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	6.120.000	6.120.000	100,00%	100,00%		
-	Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	6.120.000	6.120.000	100,00%	100,00%	Terwujudnya Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Yang
TOTAL		13.083.758.479	11.918.698.755	91,10%	108,51%		